

PERTANYAAN UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMA: MEMBANGUN SRAGEN MAJU DAN MODERN DENGAN E-GOVERNMENT

Segmen 1:

1. Dalam RPJP Kabupaten Sragen tahun 2005-2025 disebutkan bahwa untuk mengejar ketertinggalannya kabupaten Sragen perlu memiliki daya saing kuat yang memerlukan langkah strategis di bidang kelembagaan, pengembangan SDM, dan pengelolaan SDM. Bagaimana e-Government akan dapat menunjang kebijakan jangka-panjang ini dan apa yang dapat dilakukan untuk 5 tahun mendatang?
2. Dengan dasar sistem e-Government yang telah dimiliki oleh Kabupaten Sragen, apakah strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan aksesibilitas pelayanan publik? Dari ke empat unsur utama: manusia, struktur organisasi, proses tata-kerja, dan teknologi, mana yang harus menjadi prioritas utama di Sragen dan apa pertimbangannya?
3. Apakah Anda percaya bahwa e-Government dapat meningkatkan peluang investasi dan Pendapatan Asli Daerah? Apa strategi yang harus ditempuh untuk mewujudkan peran e-Government bagi efisiensi pelayanan perijinan di Kabupaten Sragen?
4. Dengan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi yang tersedia di Kabupaten Sragen sekarang ini, apa saja kelemahan yang masih dihadapi? Apa kebijakan yang harus diterapkan oleh Pemda untuk mengatasi kelemahan tersebut?

Segmen 2:

Hasil penilaian dari PeGI (Pemeringkatan Electronic Government Indonesia) Kementerian Kominfo tahun 2014 untuk Jawa Tengah masih menempatkan Kabupaten Sragen di peringkat kedua, kategori baik dengan skor 3.20. Tetapi terdapat kecenderungan bahwa sebagian komponen masih lemah dari segi kebijakan dan infrastruktur. Apakah yang harus dilakukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan peringkat pemanfaatan e-Government bagi pelayanan publik di Kabupaten Sragen dan bagaimana penjelasannya?

Segmen 3:

1. Dengan keberhasilan rintisan e-Government di kabupaten Sragen, sebenarnya struktur organisasi Pemerintah Daerah bisa dibuat lebih ramping dan efisien. Tetapi SOTK yang sekarang sebenarnya masih terlalu gemuk. Satuan apa saja yang harus dirampingkan setelah penerapan e-Government dan mengapa?
2. Penerapan e-Government sejak tahun 2005 telah meningkatkan kinerja pelayanan perijinan. Tetapi karena banyak sistem perangkat keras dan program yang diserahkan kepada pihak swasta (vendor), aparat Pemkab Sragen belum sepenuhnya bisa mengelola sehingga masih terjadi

- inefisiensi. Apa strategi pengembangan SDM di bidang TIK yang harus dilakukan?
3. Pengembangan SDM yang menunjang e-government di jajaran Pemda kabupaten Sragen masih terkendala oleh sistem rekrutmen yang belum mengarah kepada penguasaan TIK bagi calon PNS. Formasi yang dibuka oleh BKN dan kantor Menpan dan RB juga masih membatasi pengembangan SDM yang menguasai TIK. Apa kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini?
 4. Salah satu kelemahan dari penerapan e-Government di kabupaten Sragen adalah masih rendahnya peran dalam komunikasi Government-to-Citizens dan Government-to-Business. Apa kebijakan yang harus dilakukan oleh Bupati untuk meningkatkan hal tersebut?
 5. Infrastruktur penunjang e-Government di wilayah perkotaan kabupaten Sragen sudah relatif memadai bagi efisiensi pelayanan publik. Namun di wilayah pedesaan masih terdapat kebutuhan besar menyangkut ketersediaan perangkat, jaringan Internet, serta pengetahuan masyarakat tentang TIK. Bagaimana rumusan strategi untuk 5 tahun mendatang?
 6. Peran e-Government dalam menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tergantung kepada kesediaan setiap SKPD untuk berbagi data dan informasi yang terkait dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing. Apa cara yang harus ditempuh dalam peningkatan komunikasi data tersebut? Apa yang harus dilakukan untuk tercapainya standarisasi dan sekaligus menjamin keamanan data milik Pemerintah Daerah agar tetap bermanfaat bagi setiap warga di Sragen?

Disusun oleh: Wahyudi Kumorotomo, Fisipol-UGM, tgl 23 November 2015